

## C.1. KEPENDUDUKAN

Modal dasar pembangunan suatu daerah yang penting dan berpotensi secara ekonomi, salah satunya adalah banyaknya penduduk yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Akan tetapi, meskipun besar secara kuantitas saja tidak cukup membantu peningkatan pembangunan karena tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan kualitas yang cukup besar pula. Hal ini berarti, penduduk yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan, tetapi penduduk yang besar dapat pula menjadi beban pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi (kualitas rendah). Beban ketergantungan dapat dilihat dari struktur umur dan potensi penduduk atau penduduk produktif dapat diketahui dari jumlah tenaga kerja.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan, faktor sumberdaya manusia yang kuat, handal dan berkualitas sangat diperlukan sekali. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, dimana ada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar namun sumberdaya yang dimilikinya tersebut tidak mampu bersaing atau mengikuti perkembangan teknologi, sehingga berapapun besarnya kemajuan yang telah dicapai kurang dapat diterima dengan baik. Ditunjang lagi saat ini yang menjadi masalah krusial adalah semakin bertambahnya jumlah angka pengangguran.

Tabel : 32  
KEPADATAN PENDUDUK BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2002 - 2003

NO	KECAMATAN	TAHUN 2002			TAHUN 2003		
		LUAS WILAYAH (Km2)	JML PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (jiwa/km2)	LUAS WILAYAH (Km2)	JML PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (jiwa/km2)
1	Silat Hilir	1.177,10	12.061	10,25	1.177,10	13.460	11,43
2	Silat Hulu	1.061,80	9.136	8,60	1.061,80	9.435	8,89
3	<b>Hulu Gurung</b>	<b>432,90</b>	<b>10.759</b>	<b>24,85</b>	<b>432,90</b>	<b>10.704</b>	<b>24,73</b>
4	Bunut Hulu	1.118,14	9.412	8,42	1.118,14	9.511	8,51
5	Mentebah	781,26	6.977	8,93	781,26	7.086	9,07
6	Manday	1.069,00	6.742	6,31	1.069,00	7.312	6,84
7	Kalis	1.184,00	7.664	6,47	1.184,00	7.737	6,53
8	Kedamin	5.352,30	13.014	2,43	5.352,30	13.707	2,56
9	Embaloh Hilir	1.869,10	10.533	5,64	1.869,10	10.614	5,68
10	Bunut Hilir	844,10	9.233	10,94	844,10	10.207	12,09
11	Boyan Tanjung	824,00	6.646	8,07	824,00	6.690	8,12
12	Batu Datu	531,20	7.561	14,23	531,20	8.527	16,05
13	Embau	422,50	9.629	22,79	422,50	9.803	23,20
14	Selimbau	999,24	12.423	12,43	999,24	12.470	12,48
15	Suhaid	620,56	7.018	11,31	620,56	7.076	11,40
16	Seberuang	573,80	8.838	15,40	573,80	8.867	15,45
17	Semitau	562,70	6.198	11,01	562,70	6.296	11,19
18	Empanang	357,25	2.647	7,41	357,25	2.647	7,41
19	Puring Kencana	448,55	2.836	6,32	448,55	2.836	6,32
20	Badau	700,00	4.617	6,60	700,00	4.683	6,69
21	Batang Lupar	1.332,90	4.445	3,33	1.332,90	4.528	3,40
22	<b>Embaloh Hulu</b>	<b>3.457,60</b>	<b>4.693</b>	<b>1,36</b>	<b>3.457,60</b>	<b>4.693</b>	<b>1,36</b>
23	Putussibau	4.122,00	14.692	3,56	4.122,00	14.727	3,57
<b>JUMLAH</b>		<b>29.842,00</b>	<b>187.774</b>	<b>6,29</b>	<b>29.842,00</b>	<b>193.616</b>	<b>6,49</b>

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2002-2003

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk Daerah, pada akhir tahun 2003 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu tercatat telah mencapai angka 193.616 jiwa yang menyebar di 23 kecamatan yang ada. Dengan luas wilayah yang mencapai 2.984.200 Ha atau 29.842 km<sup>2</sup>, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk sebesar 6 jiwa/km<sup>2</sup> yang berarti secara hitungan angka menunjukkan bahwa dalam setiap wilayah 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh 6 penduduk. Hal ini menggambarkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif sangat kecil yang artinya masih banyak sekali tanah atau areal kosong dan merupakan potensi pembangunan yang dapat digarap dan diolah untuk kegiatan produksi khususnya dibidang pertanian yang merupakan sektor utama dalam pembangunan di daerah ini yang mayoritas masih berstatus pedesaan.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kecamatan Empanang dan Puring Kencana yang masing-masing sebesar 2.647 dan 2.836 jiwa berdasarkan hasil cacah jiwa tahun 2003. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi adalah Kecamatan Putussibau, Kedamin dan Selimbau yang masing-masing berjumlah 14.727 jiwa, 13.707 dan 12.470 jiwa. Meskipun ketiga kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang besar, namun dari perhitungan kepadatan, kecamatan Hulu Gurung yang tercatat memiliki kepadatan penduduk tertinggi, dimana mencapai 25 jiwa/km<sup>2</sup> disusul oleh kecamatan Embau dan Batu Datu yang tercatat masing-masing 23 dan 16 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan paling rendah dimiliki oleh kecamatan Embaloh Hulu yang hanya sebesar 1 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian disusul Kecamatan Kedamin dan Batang Lupar yang sama-sama memiliki kepadatan 3 jiwa/km<sup>2</sup>.

Fenomena yang variatif tersebut bisa terjadi karena tentu saja dipengaruhi oleh luas wilayah yang berbeda-beda tiap kecamatan, dimana semakin kecil luas wilayahnya maka akan cenderung semakin padat penduduknya. Secara umum, penyebaran penduduk Kapuas Hulu membentuk pola linier sesuai jalur sungai Kapuas. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas. Sejak dibangunnya ruas jalan yang menghubungkan kota Putussibau-Sintang sepanjang 262 km, yang dikenal dengan Jalur Lintas Selatan, seperti Kalis, Bunut Hulu, Mentebah, Boyang Tanjung, Batu Datu, Hulu Gurung, Seberuang, Silat Hilir dan Silat Hulu, mulai berkembang termasuk beberapa kecamatan yang berada di pesisir sungai Kapuas tetapi memiliki akses langsung dengan jalan Lintas Selatan. Hal yang sama dengan penduduk di sepanjang perbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), telah dimanfaatkan pula ruas jalur Lintas Utara, dengan membangun perumahan di sepanjang jalan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, pola pemukiman penduduk akan terus beralih mengikuti perkembangan jalur jalan yang telah ada tersebut.

**Tabel : 33**  
**BANYAKNYA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**PER KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2003**

NO	KECAMATAN	BANYAKNYA PENDUDUK ( Jiwa )							
		2000		2001		2002		2003	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Silat Hilir	6.240	5.803	6.232	5.799	6.242	5.819	6.908	6.552
2	Silat Hulu	4.591	4.314	4.698	4.365	4.690	4.446	4.835	4.600
3	Hulu Gurung	5.402	5.258	5.430	5.286	5.453	5.306	5.427	5.277
4	Bunut Hulu	4.747	4.621	4.759	4.637	4.772	4.640	4.816	4.695
5	Mentebah	3.402	3.233	3.515	3.312	3.595	3.382	3.648	3.438
6	Manday	3.340	3.262	3.410	3.327	3.413	3.329	3.698	3.614
7	Kalis	3.818	3.657	3.839	3.683	3.920	3.744	3.973	3.764
8	Kedamin	6.588	6.341	6.602	6.360	6.624	6.390	6.967	6.740
9	Embaloh Hilir	5.155	5.013	5.220	5.108	5.286	5.247	5.328	5.286
10	Bunut Hilir	4.612	4.579	4.626	4.596	4.634	4.599	5.125	5.082
11	Boyang Tanjung	3.238	3.131	3.318	3.250	3.351	3.295	3.372	3.318
12	Batu Datu	3.623	3.607	3.708	3.785	3.740	3.821	4.234	4.293
13	Embau	4.834	4.583	4.833	4.586	4.973	4.656	5.066	4.737
14	Selimbau	6.206	6.165	6.217	6.182	6.221	6.202	6.251	6.219
15	Suhaid	3.562	3.415	3.569	3.427	3.580	3.438	3.609	3.467
16	Seberuang	4.537	4.270	4.545	4.286	4.548	4.290	4.564	4.303
17	Semitau	3.014	2.989	3.047	3.021	3.124	3.074	3.161	3.135
18	Empanang	1.303	1.236	1.331	1.259	1.358	1.289	1.361	1.286
19	Puring Kencana	1.431	1.315	1.437	1.348	1.467	1.369	1.467	1.369
20	Badau	2.394	2.182	2.441	2.228	2.403	2.214	2.434	2.249
21	Batang Lupar	2.140	2.205	2.174	2.235	2.199	2.246	2.250	2.278
22	Embaloh Hulu	2.218	2.362	2.271	2.406	2.283	2.410	2.283	2.410
23	Putussibau	7.455	7.110	7.485	7.143	7.519	7.173	7.538	7.189
<b>JUMLAH</b>		<b>93.850</b>	<b>90.651</b>	<b>94.707</b>	<b>91.629</b>	<b>95.395</b>	<b>92.379</b>	<b>98.315</b>	<b>95.301</b>
<b>JUMLAH LAKI-PEREMPUAN</b>		<b>184.501</b>		<b>186.336</b>		<b>187.774</b>		<b>193.616</b>	
<b>PERTUMBUHAN ( %/ Tahun )</b>				<b>0,99</b>		<b>0,77</b>		<b>3,11</b>	

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2000-2003

Adapun perbandingan jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat dari komposisi jenis kelamin, pada akhir tahun 2004 tercatat perbandingan penduduk dengan komposisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 105,74 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan, dimana perbandingannya adalah pada setiap 100 orang perempuan terdapat 105-106 laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari angka *Dependency Ratio*, akan diketahui bahwa jumlah penduduk yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1,53. Angka ini menggambarkan bahwa setiap 100 orang harus menanggung sebanyak 153 jiwa termasuk dirinya sendiri untuk berproduktif secara ekonomi.

**Tabel : 34**  
**PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2004**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		SEX RATIO
		L	P	
1	Silat Hilir	7.010	6.518	107,55
2	Silat Hulu	4.998	4.795	104,23
3	Hulu Gurung	5.890	5.660	104,06
4	Bunut Hulu	5.809	5.423	107,12
5	Mentebah	4.086	3.750	108,96
6	Manday	3.679	3.518	104,58
7	Kalis	3.905	3.630	107,58
8	Kedamin	8.090	7.636	105,95
9	Embaloh Hilir	5.137	4.675	109,88
10	Bunut Hilir	5.152	5.024	102,55
11	Boyan Tanjung	3.370	3.217	104,76
12	Batu Datu	3.891	3.764	103,37
13	Embau	4.918	4.929	99,78
14	Selimbau	6.554	6.370	102,89
15	Suhaid	3.822	3.595	106,31
16	Seberuang	4.799	4.444	107,99
17	Semitau	3.394	3.183	106,63
18	Empanang	1.283	1.204	106,56
19	Puring Kencana	1.492	1.331	112,10
20	Badau	2.587	2.316	111,70
21	Batang Lupar	2.633	2.473	106,47
22	Embaloh Hulu	2.374	2.328	101,98
23	Putussibau	8.251	7.745	106,53
<b>JUMLAH / RATA-RATA</b>		<b>103.124</b>	<b>97.528</b>	<b>105,74</b>
<b>TOTAL LAKI-PEREMPUAN</b>		<b>200.652</b>		

Sumber : Data Dinas Kependudukan, 2004

**Tabel : 35**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**PER KELOMPOK UMUR DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2003**

NO	KELOMPOK UMUR (Tahun)	PENDUDUK			
		JENIS KELAMIN		JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE (%)
		L	P		
1	0 - 4	10.314	10.352	20.666	10,67
2	5 - 9	10.339	9.954	20.293	10,48
3	10 - 14	10.998	10.595	21.593	11,15
4	15 - 19	10.973	11.041	22.014	11,37
5	20 - 24	9.475	10.013	19.488	10,07
6	24 - 29	9.286	9.466	18.752	9,69
7	30 - 34	8.369	7.830	16.199	8,37
8	35 - 39	7.326	6.885	14.211	7,34
9	40 - 44	6.021	5.396	11.417	5,90
10	45 - 49	4.602	4.163	8.765	4,53
11	50 - 54	3.620	3.344	6.964	3,60
12	55 - 59	2.563	2.292	4.855	2,51
13	60 - 64	2.019	1.740	3.759	1,94
14	65 +	2.410	2.230	4.640	2,40
15	Tak Terjawab	0	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>98.315</b>	<b>95.301</b>	<b>193.616</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2003

Perkembangan penduduk Kapuas Hulu sejak tahun 2000, rata-rata 1,6% per tahun. Hal ini berarti pertumbuhannya berada pada tingkat lebih rendah dari pertumbuhan penduduk propinsi (sekitar 2,1% per tahun) dalam periode yang sama, sekaligus merupakan angka pertumbuhan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya seperti misalnya kabupaten Sintang yang merupakan kabupaten terdekat dan berbatasan langsung dengan Kapuas Hulu, ternyata memiliki angka pertumbuhan penduduk cukup tinggi, yakni rata-rata sekitar 2,6% per tahun.

Bila dilihat dari struktur penduduknya, Kabupaten Kapuas Hulu dapat digolongkan pada struktur penduduk muda, dimana persentase penduduk pada golongan kelompok usia muda masih lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lanjut.

Kemajuan dalam bidang kesehatan dapat kita lihat dengan menghitung tingkat kelahiran dan kematian penduduk secara kasar. Untuk tingkat kematian yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2003 mencapai 2,39 per 1000 penduduk dan tingkat kelahiran sebesar 7,64 per 1000 penduduk. Suatu indikator yang cukup bagus di bidang kesehatan karena dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran dan kematian mampu ditekan hingga dibawah 10 per 1000 penduduk.

## C.2. TENAGA KERJA

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang utama sekaligus penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menggerakkan roda pembangunan suatu daerah. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yang optimal, perlu kajian yang mendalam terhadap aspek-aspek produksi yang ada. Selain kesempatan dan lapangan kerja yang luas, kajian terhadap aspek usia produktif penduduk merupakan faktor yang cukup penting dalam peranannya sebagai aktor utama penggerak sumber-sumber produksi untuk menghasilkan kebutuhan hidup yang hakiki berupa barang dan jasa.

Berkaitan dengan pembagian kelompok umur, penduduk yang digolongkan sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) atau Tenaga Kerja adalah penduduk yang berumur diatas 15 tahun. Sedangkan Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur diatas 15 tahun yang sedang aktif bekerja dan atau yang sedang mencari pekerjaan. Sementara yang Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk berumur diatas 15 tahun yang masih/sedang sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lainnya.

**Tabel : 36**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK USIA KERJA / TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2003**

NO	PENDUDUK	JUMLAH			
		2000	2001	2002	2003
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	184.501	186.336	187.774	193.616
2	Usia Kerja / Tenaga Kerja (jiwa)	135.701	146.917	148.050	152.657
	Persentase (%)	73,55	78,85	78,84	78,85

Sumber : Dinas Nakertransos Kabupaten Kapuas Hulu, 2000-2003

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan kepada penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif melalui sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu. Berdasarkan perkembangan penduduk usia kerja/tenaga kerja seperti yang ditunjukkan dalam **tabel 36**, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 2,12% dibanding tahun 2002 sebelumnya. Tercatat pula, dari total jumlah penduduk usia kerja tahun 2003 yang sebesar 152.657 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 103.645, besaran angka pengangguran Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun tersebut adalah 49.012 jiwa.

Angka pengangguran yang hampir mencapai 33% ini jelas menunjukkan angka yang cukup tinggi dan masih sangat mengkhawatirkan.

**Tabel : 37**  
**PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2002 - 2003**

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ( jiwa )			
		2002	%	2003	%
1	Pertanian	81.174	79,98	80.638	77,80
2	Pertambangan dan Galian	2.256	2,22	1.797	1,73
3	Industri Pengolahan	2.584	2,55	973	0,94
4	Listrik, Gas dan Air	88	0,09	0	0,00
5	Bangunan	1.815	1,79	2.563	2,47
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.182	6,09	6.786	6,55
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.283	2,25	1.219	1,18
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	88	0,09	188	0,18
9	Jasa-Jasa	5.023	4,95	9.481	9,15
<b>JUMLAH</b>		<b>101.493</b>		<b>103.645</b>	

Sumber : Dinas Nakertransos Kabupaten Kapuas Hulu, 2002-2003

Dari **tabel 37** di atas, tampak bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kapuas Hulu terserap disektor pertanian. Hal ini mencerminkan pula bahwa perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu bersifat agraris karena lebih dari 75% penduduk bekerja disektor pertanian. Meskipun demikian, karena faktor keterampilan penduduk dalam bidang pertanian saat ini masih relatif rendah dan masih bercocok tanam secara tradisional, menyebabkan tingkat produktivitasnya masih relatif rendah. Disamping itu, jumlah penduduk sebagai tenaga kerja dirasakan pula tidak sebanding dengan luas lahan usaha-usaha pertanian, sehingga produktivitas sulit ditingkatkan pula. Oleh karena itu usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang terintegrasi.

Walaupun perekonomian bersifat agraris, sebenarnya sektor lainnya seperti industri, perdagangan, hotel, restoran dan jasa-jasa seyogyanya dapat dikembangkan secara maksimal dan simultan. Sebagai contoh, dari hasil-hasil pertanian dapat digunakan sebagai bahan baku usaha industri sebagaimana mendukung upaya pengembangan dan perluasan kegiatan perekonomian yang semula bersifat agroculture diarahkan menuju kegiatan yang bersifat agrobisnis. Usaha-usaha diversifikasi lapangan usaha pada sektor-sektor non pertanian yang berkesinambungan diharapkan nantinya mampu meningkatkan dan menciptakan pemerataan terhadap struktur perekonomian yang selama ini masih bertumpu pada kegiatan sektor pertanian.

### **C.3. KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

Untuk melihat dan menilai kinerja sektor kesehatan di daerah Kapuas Hulu selama periode tahun 2000-2004 dapat dilihat melalui perkembangan beberapa indikator, diantaranya yakni: perkembangan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Kebijakan pemerintah dibidang kesehatan berupa penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Adanya partisipasi yang aktif, baik dari pihak masyarakat maupun pihak swasta turut mendukung peningkatan upaya pembangunan dan pengembangan sektor kesehatan ini. Salah satu bentuk partisipasi aktif dari masyarakat tersebut adalah semakin banyaknya jumlah Posyandu yang tumbuh dan tersebar hampir merata di seluruh wilayah desa/kecamatan. Sedangkan peranserta pihak swasta terlihat dari adanya usaha-usaha pengembangan fasilitas kesehatan berupa penyediaan apotek-apotek dan toko obat yang cukup

memadai. Peranserta masyarakat dan pihak swasta ini setidaknya cukup membantu upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menunjang program pelayanan kesehatan dasar yang diharapkan mampu menjangkau seluruh penduduk di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu program pemerintah dalam upaya pelayanan kesehatan dasar masyarakat adalah penyediaan atau penambahan fasilitas prasarana kesehatan berupa puskesmas, puskesmas perawatan dan puskesmas pembantu. Lewat program yang telah dijalankan ini, diharapkan dapat menjawab dan mengatasi kendala yang ada selama ini yakni berupa kurangnya jumlah fasilitas rumah sakit di Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya mengeliminasi sebagian permasalahan sektor kesehatan, khususnya berkaitan dengan pengaruh faktor fisik geografis, dimana dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini (29.842 km<sup>2</sup>) dan terdiri dari 23 kecamatan serta 148 desa/kelurahan, keberadaan 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah dinilai sangat jauh dari memadai sehingga berdampak pula pada pelayanan kesehatan yang tidak berjalan optimal. Seperti diketahui, saat ini satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu adalah RSUD dr. Achmad Diponegoro yang berlokasi di ibukota kabupaten Putussibau dengan jumlah fasilitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 68 unit pada tahun 2004 atau meningkat 12 unit (21,4%) dibanding tahun 2003 sebelumnya.

Jika melihat rata-rata rasio jangkauan fasilitas puskesmas terhadap luas wilayah, maka pada tahun 2004 tercatat satu unit puskesmas mampu menjangkau wilayah seluas 1.297,48 km<sup>2</sup> atau mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding awal periode tahun 2000 dimana tercatat satu unit puskesmas meliputi wilayah seluas 1.570,63 km<sup>2</sup>. Hal serupa terjadi pula pada peningkatan rasio jangkauan untuk fasilitas puskesmas perawatan dan puskesmas pembantu yang secara keseluruhan mencerminkan semakin tingginya tingkat kepedulian pemerintah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. Akan tetapi jika melihat rasio fasilitas kesehatan yang ada terhadap pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tiap tahunnya, keberadaan fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini masih belum memadai dan perlu dilakukan peningkatan lagi baik secara kuantitas maupun secara kualitas melalui upaya-upaya pemeliharaan dan pengembangan sumberdaya manusianya.

**Tabel : 38**  
**BANYAKNYA PRASARANA KESEHATAN**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	FASILITAS	JUMLAH ( unit )				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Rumah Sakit - RSUD - Tempat Tidur	1 -	1 -	1 56	1 56	1 68
2	Puskesmas - Puskesmas Utama - Puskesmas Pembantu	19 72	19 72	20 73	22 76	23 74
3	Posyandu	233	277	257	257	271
4	Polindes	150	155	160	160	163
5	Dokter Praktek	-	-	-	4	4
6	Apotek	2	2	2	3	3
7	Toko Obat	-	-	-	1	2
8	Rumah Bersalin Swasta	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2000-2004

Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, selama periode lima tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuatif namun sebagian tetap stabil dan meningkat tiap tahunnya dari segi penyediaan atau kuantitasnya. Untuk tenaga dokter, ketersediaan dokter umum untuk tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, diantaranya untuk periode 2003-2004 mengalami peningkatan jumlah yakni sebanyak 4 orang dimana pada tahun 2003 yang berjumlah 19 orang menjadi 23 orang pada tahun 2003 atau bertambah sebanyak 4 orang. Sedangkan tenaga dokter spesialis dan dokter gigi dalam periode 3 tahun terakhir jumlahnya tetap yakni masing-masing 1 orang dokter spesialis dan 2 dokter gigi. Adapun penyebaran tenaga dokter ini tercatat 1 orang dokter spesialis dan 4 orang dokter umum

serta 1 orang dokter gigi bertugas di RSUD kota Putussibau, sedangkan lainnya bertugas di beberapa puskesmas (kecamatan) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari data jumlah tenaga dokter tersebut, secara spesifik dapat pula ditentukan rasio ketersediaan tenaga medis (dokter) terhadap jumlah penduduk, dimana pada tahun 2004 jumlah proyeksi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah 193.616 jiwa yang berarti rasio jumlah penduduk terhadap ketersediaan tenaga dokter pada tahun 2004 adalah sebesar 8.418,09 untuk dokter umum, 193.616,00 untuk dokter spesialis dan sebesar 96.808,00 untuk dokter gigi. Atau dengan kata lain, angka tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 1 orang dokter umum melayani 8.418 jiwa penduduk, kemudian 1 dokter spesialis bertugas untuk melayani seluruh penduduk yang ada serta untuk setiap 1 dokter gigi harus melayani setengah dari total jumlah penduduk Kapuas Hulu. Dari rasio ini jelas mencerminkan betapa ketersediaan tenaga medis (dokter) di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih sangat jauh dari memadai bahkan sangat minim jika dibandingkan dengan rasio standar ISO 2010 yang ditetapkan. Seperti diketahui bahwa standar ketersediaan dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi untuk setiap 100.000 penduduk adalah sebesar 40; 6; dan 11 atau dengan kata lain 1 orang dokter umum melayani maksimal untuk 2.500 jiwa penduduk, kemudian 1 orang dokter spesialis melayani 16.667 penduduk dan 1 orang dokter gigi efektif melayani maksimal 9.091 penduduk.

**Tabel : 39**  
**BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN**  
**TAHUN 2000 - 2004**

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH TENAGA ( Orang )				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Dokter					
	a. Dokter Umum	22	14	15	19	23
	b. Dokter Gigi	2	3	2	2	2
	c. Dokter Spesialis	-	-	-	1	1
2	Paramedis					
	a. Perawat	150	195	196	248	250
	b. Non Perawat	77	73	47	35	39
3	Non Medis	62	62	62	63	79
<b>JUMLAH</b>		<b>313</b>	<b>347</b>	<b>322</b>	<b>368</b>	<b>394</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2000-2004

Selanjutnya, dari data tenaga paramedis yang tercatat hingga tahun 2004, perkembangannya dari aspek kuantitas menunjukkan peningkatan yang cukup positif. Terjadi kenaikan jumlah hingga 62 orang dari tahun 2002 (227 orang) hingga akhir tahun 2004 yang terdata sebanyak 289 orang tenaga paramedis. Kenaikan cukup tinggi ini setidaknya sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tenaga perawat yang bertugas yakni sebesar 100 orang sedangkan non perawat mengalami penurunan sebanyak 38 orang. Pada tahun 2004 ini terlihat bahwa rasio tenaga paramedis terhadap jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah 1 (satu) tenaga paramedis melayani 670 jiwa penduduk.

Disamping tenaga medis dan paramedis, dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga didukung oleh keberadaan tenaga non medis. Perkembangan tenaga kesehatan non medis di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2000 hingga 2004 menunjukkan kecenderungan yang meningkat pula, dimana pada tahun 2000 jumlah tenaga non medis adalah sebanyak 62 orang dan pada tahun 2004 tercatat sebanyak 79 orang yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 17 orang atau naik sebesar 27,41%.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat kekurangan tenaga medis (dokter) terutama tenaga dokter spesialis. Standarisasi kebutuhan dokter spesialis untuk sebuah rumah sakit setidaknya terdiri dari beberapa dokter spesialis diantaranya spesialis bedah, penyakit dalam dan spesialis anak. Oleh sebab itu perlu dipikirkan adanya penambahan jumlah tenaga dokter spesialis untuk kedepan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat berjalan optimal.

Minimnya tenaga dokter tersebut secara umum tidak saja terjadi di ibukota kabupaten (RSUD) namun hampir dialami di beberapa kecamatan (puskesmas) seperti Puskesmas Puring Kencana, Nanga Suhaid dan Puskesmas Nanga Kantuk yang bahkan sama sekali tidak tersedia tenaga dokter. Kondisi ini tentunya menyebabkan sangat terganggunya kesinambungan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Fenomena umum yang dicatat dari kondisi minimnya tenaga dokter ini adalah terjadi sebagai akibat banyaknya dokter yang tidak betah tinggal atau ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan alasan keterbatasan transportasi, rumah dinas yang sudah tidak layak tinggal serta penghasilan praktek swasta sebagai dokter umum ataupun dokter gigi yang tidak dapat diharapkan mampu menutupi biaya pendidikan spesialis. Kondisi serupa terjadi pada tenaga paramedis seperti perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah pedalaman yang terpencil.

Indikator derajat kesehatan masyarakat dapat ditinjau juga dari beberapa aspek, diantaranya angka kesakitan, angka kematian bayi, angka kematian ibu, status gizi masyarakat, perilaku masyarakat serta kesehatan lingkungan. Dari data tahun 2004 tercatat angka kesakitan (*morbilitas*) di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 51.015 kasus atau meningkat sebesar 2.958 kasus atau naik 6,16% dibanding tahun 2003 sebelumnya yang tercatat sebanyak 48.057 kasus. Namun jika dibandingkan data tahun 2002, sempat terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2003 sebesar 2.839 kasus dimana pada tahun 2002 tercatat sebanyak 50.896 kasus.

**Tabel : 40**  
**10 BESAR PENYAKIT**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2002 - 2004**

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS DAN PERSENTASE					
		2002		2003		2004	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Penyakit Lainnya	9.603	18,87	9.424	19,61	9.317	18,26
2	ISPA	9.006	17,69	8.313	17,30	9.834	19,28
3	Malaria Klinis (tanpa pemeriksaan lab)	8.336	16,38	8.482	17,65	8.639	16,93
4	Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan Pengikat	5.260	10,33	5.491	11,43	5.463	10,71
5	Diare	4.784	9,40	3.847	8,01	4.016	7,87
6	Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan Atas	2.936	5,77	2.251	4,68	2.872	5,63
7	Penyakit Darah Tinggi	3.123	6,14	3.071	6,39	3.838	7,52
8	Penyakit Alergi Kulit	2.912	5,72	2.494	5,19	2.728	5,35
9	TB Paru	2.746	5,40	2.537	5,28	2.178	4,27
10	Penyakit Kulit Infeksi	2.190	4,30	2.147	4,47	2.130	4,18
<b>JUMLAH</b>		<b>50.896</b>	<b>100,00</b>	<b>48.057</b>	<b>100,00</b>	<b>51.015</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2002-2004

Berdasarkan **tabel 40** tersebut di atas, sebagian besar angka kesakitan masih didominasi oleh kelompok penyakit menular pada pelayanan kesehatan dasar. Dari keseluruhan kelompok penyakit yang tercatat, penyakit malaria dan ISPA menjadi skala prioritas masalah yang hampir ditemukan di seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah penderita yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya intervensi program promosi, pencegahan dan penanggulangan kedua kelompok penyakit ini secara lebih intensif.

Indikator selanjutnya adalah angka kematian (ibu dan anak/bayi), dimana jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2004 terakhir adalah sebanyak 62 kasus. Meskipun menunjukkan jumlah penurunan yang cukup signifikan dibanding periode tahun-tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih cukup tinggi terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu jika dibandingkan dengan standarisasi ISO 2010 yakni 25 per 100.000 Kelahiran Hidup (untuk Ibu Hamil). Sebagai perbandingan, pada tahun 2004 dari 6.952 sasaran ibu hamil tercatat 12 kasus kematian ibu hamil/melahirkan atau dengan kata lain angka tersebut setara dengan lebih dari 170 kasus per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel : 41**  
**ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	ANGKA KEMATIAN	JUMLAH KASUS ( jiwa )				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	Angka Kematian Ibu	15	25	20	24	12
2	Angka Kematian Bayi	68	78	73	88	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>93</b>	<b>112</b>	<b>62</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2000-2004

Salah satu faktor yang dipandang berpengaruh besar terhadap terjadinya kematian ibu dan bayi sebagaimana dikemukakan di atas, adalah faktor persalinan yang sebagian besar saat ini masih dibantu atau dilakukan oleh dukun bayi (hampir mencapai 48% berdasarkan data Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004). Jika dikaitkan dengan standar ISO 2010 bahwa 90% kegiatan persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan, sementara yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu hanya 52,26% persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan. Hal ini tentu terkait dengan masih minimnya tenaga kesehatan khususnya tenaga bidan yang ada. Tercatat pula dari 163 polindes hanya 89 (54,60%) yang terisi oleh tenaga bidan. Disamping itu faktor geografis yang luas dan sulit terjangkau menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jauh dari memadai. Demikian pula faktor tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan khususnya untuk pemeriksaan kehamilan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan persalinan yang rata-rata masih jauh dari standar ISO 2010 untuk pemeriksaan ibu hamil baik K1 (kunjungan minimal 1 kali) maupun K4.

Status gizi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu salah satunya dapat dilihat dari aspek Kurang Energi Protein (KEP) pada balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004, tercatat adanya penurunan angka KEP yang cukup positif. Jika pada tahun 2001 nilai KEP yakni status gizi buruk+kurang tercatat sebesar 27,42%, maka pada tahun 2004 terjadi penurunan menjadi 21,32%. Meskipun demikian, angka tersebut mencerminkan status gizi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih cukup memprihatinkan dan perlu dilakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka penanganan kasus gizi buruk masyarakat secara lebih intensif dan terukur. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisasi faktor kendala yang umum ditemukan yakni terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan tentang gizi yang relatif masih rendah.

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang ada dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang lazim ditemukan selama ini diantaranya adalah kebiasaan penduduk dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus (MCK) yang menggunakan sumber air dalam satu badan sungai yang sama sebagai sumber air bakunya, kebiasaan merayakan suatu keberhasilan seperti panen raya dengan cara minum minuman keras (tuak, arak dan sejenisnya) serta kebiasaan penduduk dalam bekerja disektor informal seperti kerja kayu di hutan atau penambangan emas tradisional, yang sering membuka pakaian/baju yang secara klinis memudahkan terjadinya serangan gigitan nyamuk atau serangga vektor penyakit lainnya dan menciptakan terjadinya rantai penularan penyakit.

Secara keseluruhan, berdasarkan uraian tersebut di atas, beberapa permasalahan, kendala dan hambatan yang dijumpai dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode lima tahun terakhir, diantaranya adalah :

- 
1. Luas dan kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu menyebabkan jangkauan pelayanan kesehatan masih sangat minim.
  2. Masih rendah atau kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan
  3. Terbatasnya jumlah dan kualitas baik prasarana, sarana maupun tenaga kesehatan yang tersedia.
  4. Jumlah anggaran dan dana operasional untuk pelayanan kesehatan relatif masih minim dan terbatas

Uraian selanjutnya yang juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan masyarakat adalah program pengendalian pertumbuhan penduduk yang salah satunya diupayakan melalui gerakan Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Adapun pengendalian penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang ideal. Keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain berkat peranserta masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah, khususnya dibidang Keluarga Berencana.

Program KB merupakan usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran melalui alat kontrasepsi secara berkesinambungan. Berdasarkan data kependudukan dan keluarga sejahtera yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah peserta Keluarga Berencana Aktif untuk masing-masing jenis kontrasepsi mengalami penurunan dan kenaikan selama periode 5 tahun terakhir. Beberapa data yang tercatat mengalami kenaikan pada tahun 2003 dibanding tahun 2002 sebelumnya berdasarkan metode kontrasepsi diantaranya adalah pada jenis kontrasepsi PIL naik sebesar 5,48%, KDM 196,23% dan suntikan 2,41%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan peserta KB aktif sebesar 4,42% dari Pasangan Usia Subur (PUS).

Indikator peningkatan pelayanan Keluarga Berencana guna memberikan rangsangan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk turut berpartisipasi, ditunjukkan dengan munculnya akseptor atau peserta KB baru. Adapun jumlah akseptor baru untuk masing-masing jenis alat kontrasepsi tahun 2003, secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2002 yang pencapaiannya sebesar 53,10%, sedangkan tahun 2003 tercatat sebesar 61,41%.

#### **C.4. PENDIDIKAN**

Titik berat pembangunan pendidikan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan sekolah lanjutan tingkat atas serta pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan perkembangan tuntutan pembangunan dan potensi daerah.

Dalam pembangunan pendidikan, seluruh modal dasar pembangunan didayagunakan, terutama penduduk yang jumlahnya besar sebagai SDM yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah/nasional. Salah satu usaha Pemerintah maupun Swasta dibidang pendidikan dalam mengimbangi pertumbuhan penduduk, khususnya usia muda adalah dengan menyediakan sarana fisik pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Hal ini perlu terus dilanjutkan dalam rangka pencapaian salah satu tujuan pembangunan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan 4 (empat) sasaran berupa peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, peningkatan penguasaan iptek, peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah serta peningkatan pembinaan pemuda dan olah raga.

Pada sub sektor pendidikan formal di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang relatif meningkat khususnya dari aspek kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana baik yang menyangkut jumlah sekolah, ruang kelas, guru atau tenaga pengajar serta siswa atau murid. Disamping itu terjadi pula peningkatan pada pemerataan dan perluasan pendidikan serta prevalensi dan kualitas pendidikan.

Tabel : 42

**FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2000 - 2004**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN / JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	<b>SD / MI</b>					
	- Bangunan Sekolah (unit)	381	379	380	389	389
	- Ruang Kelas (unit)	1.788	2.010	2.010	1.762	2.223
	- Guru / Tenaga Pengajar (orang)	2.013	2.184	2.283	2.291	2.291
	- Siswa / Murid (orang)	28.737	28.162	28.164	29.452	29.452
	- Rasio Guru-Ruang Kelas	1,13	1,09	1,14	1,30	1,03
	- Rasio Guru-Sekolah	5,28	5,76	6,01	5,89	5,89
	- Rasio Siswa-Ruang Kelas	16,07	14,01	14,01	16,72	13,25
	- Rasio Siswa-Sekolah	75,43	74,31	74,12	75,71	75,71
- Rasio Siswa-Guru	14,28	12,89	12,34	12,86	12,86	
2	<b>SLTP / MTs</b>					
	- Bangunan Sekolah (unit)	60	60	60	58	60
	- Ruang Kelas (unit)	319	319	331	353	353
	- Guru / Tenaga Pengajar (orang)	664	556	695	683	683
	- Siswa / Murid (orang)	7.554	6.853	7.336	6.962	6.962
	- Rasio Guru-Ruang Kelas	2,08	1,74	2,10	1,93	1,93
	- Rasio Guru-Sekolah	11,07	9,27	11,58	11,78	11,38
	- Rasio Siswa-Ruang Kelas	23,68	21,48	22,16	19,72	19,72
	- Rasio Siswa-Sekolah	125,90	114,22	122,27	120,03	116,03
- Rasio Siswa-Guru	11,38	12,33	10,56	10,19	10,19	
3	<b>SLTA / MA</b>					
	- Bangunan Sekolah (unit)	19	20	25	26	26
	- Ruang Kelas (unit)	87	87	106	122	116
	- Guru / Tenaga Pengajar (orang)	292	312	404	450	450
	- Siswa / Murid (orang)	3.218	3.687	3.752	3.684	3.684
	- Rasio Guru-Ruang Kelas	3,36	3,59	3,81	3,69	3,88
	- Rasio Guru-Sekolah	15,37	15,60	16,16	17,31	17,31
	- Rasio Siswa-Ruang Kelas	36,99	42,38	35,40	30,20	31,76
	- Rasio Siswa-Sekolah	169,37	184,35	150,08	141,69	141,69
- Rasio Siswa-Guru	11,02	11,82	9,29	8,19	8,19	
<b>TOTAL ( 1+ 2+ 3 )</b>						
- Bangunan Sekolah (unit)	460	459	465	473	475	
- Ruang Kelas (unit)	2.194	2.416	2.447	2.237	2.692	
- Guru / Tenaga Pengajar (orang)	2.969	3.052	3.382	3.424	3.424	
- Siswa / Murid (orang)	39.509	38.702	39.252	40.098	40.098	
- Rasio Guru-Ruang Kelas	1,35	1,26	1,38	1,53	1,27	
- Rasio Guru-Sekolah	6,45	6,65	7,27	7,24	7,21	
- Rasio Siswa-Ruang Kelas	18,01	16,02	16,04	17,92	14,90	
- Rasio Siswa-Sekolah	85,89	84,32	84,41	84,77	84,42	
- Rasio Siswa-Guru	13,31	12,68	11,61	11,71	11,71	

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2003 dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2004

Peningkatan fasilitas pendidikan tergambar dari adanya penambahan jumlah sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan, yakni sebanyak 15 sekolah dimana pada tahun 2000 tercatat sebanyak 460 unit menjadi 475 unit pada tahun 2004. Peningkatan kuantitas fasilitas sekolah ini ditunjang pula oleh peningkatan jumlah ruang kelas sebanyak 498 unit. Sedangkan untuk jumlah guru dan siswa selama periode 2000-2004, secara umum cenderung mengalami peningkatan pula setiap tahunnya untuk seluruh jenjang pendidikan. Tercatat 455 guru dan 589 siswa yang bertambah pada tahun 2004 dibanding periode awal tahun 2000. Dari data peningkatan fasilitas pendidikan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan demi tercapainya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Selanjutnya dari data-data tersebut di atas, dapat diketahui rasio jumlah sekolah, siswa dan guru secara keseluruhan. Penghitungan rasio-rasio ini sangat penting bagi penentuan nilai kualitas

---

dan pemerataan pendidikan dasar-menengah secara umum. Berdasarkan **tabel 42** dapat dilihat adanya peningkatan kualitas pendidikan yang dicerminkan oleh rasio jumlah guru dan siswa pada setiap satuan kelas dan sekolah yang ada. Rasio tenaga pengajar per sekolah selama periode lima tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan menjadi 7,21 pada tahun 2004 yang berarti bahwa setiap sekolah rata-rata ditangani oleh 7 orang tenaga pengajar/guru. Demikian pula dengan rasio tenaga pengajar per ruang kelas meningkat menjadi 1,27 yang berarti setiap ruang kelas telah ditangani sekurang-kurangnya atau paling tidak satu orang guru pengajar. Angka-angka tersebut mencerminkan tingkat kualitas penanganan sekolah dan ruang kelas oleh tenaga pengajar yang ada cukup memadai, meskipun untuk kedepan masih perlu penambahan tenaga pendidik khususnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Sementara dari rasio jumlah siswa terhadap ketersediaan sekolah dan ruang kelas untuk seluruh jenjang pendidikan, menunjukkan angka yang cukup baik dimana tercatat tahun 2004 rasio jumlah siswa per sekolah sebesar 84,42 dan rasio jumlah siswa per ruang kelas sebesar 14,90. Rasio tersebut, khususnya rasio jumlah siswa per ruang kelas, menunjukkan angka kualitas yang masih didalam ambang batas sehat untuk rata-rata jumlah siswa yang layak ditampung untuk setiap satuan ruang kelas yang digunakan. Akan tetapi jika dilihat dari tiap tingkat atau jenjang pendidikan, untuk jenjang pendidikan SD masih dimungkinkan penambahan jumlah siswa hingga mencapai kapasitas ruang kelas yang optimal, namun sebaliknya untuk jenjang pendidikan SLTA perlu kiranya pertimbangan untuk penambahan jumlah ruang kelas sehingga daya tampung satuan ruang kelas juga optimal secara kualitas.

Analisa terakhir terhadap rasio jumlah siswa dan tenaga pengajar menunjukkan penurunan angka selama periode lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2004 tercatat rasio siswa per guru sebesar 11,71 yang turun dari 13,31 pada tahun 2000. Hal ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan kualitas penanganan siswa oleh tenaga pengajar, artinya dari setiap 11-12 siswa yang ada sekurang-kurangnya telah tersedia satu orang tenaga pengajar yang menangani. Dengan kata lain, secara kualitas proses belajar mengajar dapat berlangsung relatif lebih baik dan optimal yang dicerminkan dengan semakin kecil rasio siswa per guru akan semakin tinggi dan maksimal transfer ilmu yang dapat diberikan guru terhadap anak didiknya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terjadinya dinamika yang positif ke arah peningkatan disektor pendidikan formal tersebut di atas, memberikan signal semakin besarnya tingkat kepedulian pemerintah daerah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan potensi masyarakat yang adil dan merata dalam rangka mencerdaskan masyarakat seutuhnya di daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja lain yang berkaitan dengan pemerataan dan perluasan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar di Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2000-2004 ditunjukkan melalui persentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Siswa (APS) sebagaimana dirinci dalam **tabel 43**.

**Tabel : 43**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR APK, APM DAN APS**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK) - %</b>					
	- SD / MI	130,62	135,15	135,15	149,99	149,99
	- SLTP / MTs	48,75	52,46	52,46	66,81	66,81
	- SMU / SMK / MA	31,56	32,15	32,15	34,81	34,81
2	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) - %</b>					
	- SD / MI	110,20	112,23	112,23	116,80	116,80
	- SLTP / MTs	39,54	40,58	40,58	56,46	56,46
	- SMU / SMK / MA	22,20	23,50	23,50	24,18	24,18
3	<b>Angka Pendaftaran Siswa (APS) - orang</b>					
	- SD / MI	4.789,00	4.898,00	4.898,00	5.154,00	5.154,00
	- SLTP / MTs	5.574,00	6.450,00	6.450,00	6.587,00	6.587,00
	- SMU / SMK / MA	989,00	1.021,00	1.021,00	1.334,00	1.334,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2004

**Angka Partisipasi Kasar (APK)** menunjukkan seberapa besar jumlah siswa yang ada atau yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APK menunjukkan semakin baik kinerja pendidikan yang sekaligus menggambarkan pula meningkatnya kesadaran dan pemerataan pendidikan di wilayah bersangkutan.

Untuk Kabupaten Kapuas Hulu selama periode 2000 hingga tahun 2004, tercatat adanya kecenderungan peningkatan nilai APK pada setiap jenjang pendidikan, dimana nilai APK tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, kemudian diikuti oleh jenjang pendidikan SLTP/MTs dan terakhir SMU/SMK/MA. Peningkatan rata-rata pertumbuhan APK yang terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sejak tahun 2000 hingga 2004 adalah sebesar 19,37%, kemudian SLTP/MTs sebesar 18,06% dan SLTA/MA sebesar 3,25%. Adapun APK pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar tercatat pencapaiannya melebihi 100% yang berarti hampir seluruh penduduk pada usia sekolah dasar telah bersekolah yang ditambah penduduk diluar usia sekolah dasar yang masih bersekolah di tingkat SD/MI sehingga APKnya pun melebihi angka 100%.

**Angka Partisipasi Murni (APM)** menunjukkan seberapa besar jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan usia untuk jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, semakin besar nilai APM menunjukkan semakin baik kinerja pendidikan yang sekaligus menggambarkan pula meningkatnya kesadaran dan pemerataan pendidikan di wilayah bersangkutan.

Selama periode tahun 2000-2004, terjadi peningkatan angka APM untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana nilai tertinggi dicapai oleh jenjang pendidikan SLTP/MTs yang diikuti oleh jenjang SD/MI dan terakhir SLTA/MA. Peningkatan APM yang terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI sejak tahun 2000 hingga 2004 adalah sebesar 6,60%, kemudian SLTP/MTs sebesar 16,92% dan SLTA/MA sebesar 1,98%.

**Angka Pendaftaran Siswa (APS)** menunjukkan seberapa besar jumlah siswa yang mendaftar pada jenjang pendidikan tertentu. Selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, tercatat pula adanya kecenderungan peningkatan angka APS untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dimana nilai paling besar terjadi pada jenjang pendidikan SLTP/MTs kemudian diikuti pada jenjang SD/MI dan terakhir SLTA/MA. Peningkatan APS yang terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI selama lima tahun terakhir adalah sebesar 365 siswa kemudian SLTP/MTs sebesar 1.013 siswa dan SLTA/MA sebesar 345 siswa.

Disamping indikator-indikator di atas, ada beberapa indikator lain yang layak dikemukakan di sini berkaitan dengan tingkat mutu atau kualitas baik sistem pendidikan maupun program-program

pembangunan sektor pendidikan yang telah dijalankan. Indikator tersebut diantaranya adalah Angka Melanjutkan Sekolah dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai Ujian Akhir Nasional (UAN). **Angka Melanjutkan Sekolah** merupakan indikator keberlanjutan sekolah dari jenjang pendidikan yang lebih rendah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin besar angka melanjutkan sekolah maka mencerminkan semakin baik pula kinerja sistem dan program pendidikan yang telah berjalan. Sedangkan **Nilai Ebtanas Murni** atau **Nilai Ujian Akhir Nasional** merupakan indikator kualitas lulusan pendidikan pada jenjang tertentu yang juga terkait erat dengan jumlah dan rasio guru layak mengajar. Semakin besar jumlah dan rasio guru layak mengajar maka berimplikasi pula pada semakin besarnya kontribusi terhadap peningkatan rata-rata nilai NEM atau UAN.

Dari **tabel 44** terlihat bahwa selama periode 2000-2004, indikator Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, meskipun Angka Melanjutkan Sekolah dari jenjang pendidikan SLTP ke SLTA cenderung menunjukkan penurunan rasio selama rentang tahun 2000 hingga 2004. Besaran rata-rata angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SLTA/MA tercatat sebesar 89,42% per tahun dan sebesar 97,65% untuk rata-rata rasio angka melanjutkan sekolah ke jenjang SLTP/MTs.

**Tabel : 44**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	<b>Angka Melanjutkan Sekolah ke SLTP/MTs</b>					
	- Jumlah Lulusan SD/MI (orang)	3.560,00	3.745,00	3.745,00	3.768,00	3.768,00
	- Jumlah yang Melanjutkan ke SLTP/MTs (orang)	3.450,00	3.652,00	3.652,00	3.698,00	3.698,00
	- Rasio (%)	96,91	97,52	97,52	98,14	98,14
2	<b>Angka Melanjutkan Sekolah ke SLTA/MA</b>					
	- Jumlah Lulusan SLTP/MTs (orang)	1.495,00	1.581,00	1.581,00	1.745,00	1.745,00
	- Jumlah yang Melanjutkan ke SLTA/MA (orang)	1.387,00	1.462,00	1.462,00	1.478,00	1.478,00
	- Rasio (%)	92,78	92,47	92,47	84,70	84,70

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2004

Sementara peningkatan terbesar dari indikator nilai NEM atau UAN selama periode tahun 2000 hingga tahun 2004 di Kabupaten Kapuas Hulu, terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan SLTP/MTs. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA/MA mengalami penurunan terutama pada periode setahun terakhir. Meskipun demikian, jika dilihat dari rasio guru layak mengajar tercatat jenjang pendidikan SLTA/MA memiliki persentase terbesar yakni sebesar 80,95% pada tahun 2004. Sedangkan jenjang SLTP/MTs dan SD masing-masing tercatat 64,56% dan 45,11%.

**Tabel : 45**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	<b>Rata-Rata NEM / UAN</b>					
	- SD / MI	3,55	3,80	3,87	4,25	4,67
	- SLTP / MTs	5,89	6,23	5,75	6,70	6,41
	- SMU / SMK / MA	5,69	6,54	6,27	6,85	5,27
2	<b>Rasio Guru Layak Mengajar (%)</b>					
	- SD / MI	60,10	63,16	63,16	64,56	64,56
	- SLTP / MTs	41,55	42,15	42,15	45,11	45,11
	- SMU / SMK / MA	80,25	81,78	81,78	80,95	80,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2004

Beberapa permasalahan dan kendala yang ditemukan selama ini dalam upaya pembangunan pada sektor pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya adalah :

- a. Masih kurangnya tenaga pengajar baik secara kualitas maupun kuantitas terutama di daerah-daerah terpencil
- b. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SLTP dan SLTA tercatat masih relatif rendah, termasuk juga rendahnya Angka Transisi (AT) disemua jenjang pendidikan serta masih ditemukannya angka Drop Out (DO) atau putus sekolah.
- c. Kondisi dan mutu serta jumlah beberapa sarana prasarana pendidikan dalam rangka pelayanan bagi masyarakat masih belum optimal yang didukung pula masih rendahnya kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sub sektor pendidikan non formal untuk daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilihat dari keberadaan dan perkembangannya selama periode lima tahun terakhir selayaknya tidak dapat diabaikan juga. Pembangunan pendidikan non formal pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya diluar pendidikan formal melalui peningkatan keterampilan, keahlian dan pengetahuan masyarakat serta dimaksudkan dalam upaya pemberantasan buta huruf bagi seluruh lapisan masyarakat Kapuas Hulu. Adapun perkembangan pendidikan non formal di Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana dapat dilihat pada **tabel 46**.

**Tabel : 46**  
**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2004**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
<b>1</b>	<b>Fasilitas Pendidikan (unit)</b>					
	- Pesantren	1	1	2	2	3
	- Kursus	1	2	2	3	4
	- PKBM	0	0	8	8	8
	- Kejar Paket A	8	10	10	11	10
	- Kejar Paket B	17	17	18	19	23
	- Kejar Paket C	2	2	2	2	4
<b>2</b>	<b>Siswa / Peserta (orang)</b>					
	- Pesantren	340	355	415	393	304
	- Kursus	15	35	32	55	70
	- PKBM	0	0	40	40	40
	- Kejar Paket A	0	0	240	240	220
	- Kejar Paket B	340	400	480	660	600
	- Kejar Paket C	40	40	40	40	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu 2004

### C.5. KEAGAMAAN

Pembangunan bidang keagamaan perlu semakin ditingkatkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terjalin dan tercipta kerukunan kehidupan beragama dengan saling menghormati satu sama lain. Pada akhirnya diharapkan terciptanya suasana yang damai dan harmonis sebagai perwujudan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dan utuh.

Sehubungan dengan penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang lebih demokratis dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, telah dilaksanakan dan dikembangkan upaya-upaya dialog antar pemuka agama yang ada. Dialog interaktif ini dilaksanakan secara periodik dan terencana, baik mengenai masalah-masalah krusial maupun pemecahan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan disegala bidang.

Disamping itu, pembangunan bidang agama diupayakan pada pengadaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kehidupan beragama. Berdasarkan data yang diperoleh dari

---

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2004 tercatat jumlah rumah ibadah yang ada di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu adalah: mesjid dan surau sebanyak 339 buah, gereja dan kapel untuk umat Katolik dan Protestan masing-masing sebanyak 198 buah dan 195 buah (tidak jauh berubah dibanding data tahun sebelumnya yang berjumlah 194 gereja dan 199 buah kapel) serta vihara sebanyak 1 buah. Sementara jumlah pemeluk agama menurut golongan agama pada data terakhir tahun 2004, tercatat agama Islam sebanyak 106.298 pemeluk, Protestan 21.689 orang, Katolik 58.113 orang, Budha 87 orang, Hindu sebanyak 289 pemeluk dan lainnya sebanyak 9.029 orang. Jadi, total keseluruhan adalah 195.605 pemeluk agama di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari segi kualitas rumah ibadah yang ada saat ini, sebagian besar dalam kondisi cukup baik. Hal ini dimungkinkan oleh tingginya peranserta masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga keberadaan rumah ibadah sebagai sarana tempat beribadah sekaligus menunjukkan pula bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu semakin sadar akan kewajibannya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Meskipun demikian, jika dilihat dari kuantitas rumah ibadah yang ada saat ini dan dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama yang berbeda-beda tersebut, sebenarnya jumlah ibadah khususnya untuk umat Hindu dan Budha dirasa masih jauh dari memadai, bahkan keberadaan tempat ibadah untuk pemeluk agama Hindu saat ini tidak ditemukan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah setempat khususnya dinas terkait diharapkan dapat membantu pengadaan rumah-rumah ibadah yang masih minim yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan swakarsa pemeluk agama bersangkutan serta pemberian kemudahan dalam perijinan pembangunan ataupun bantuan-bantuan materiil prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu mencatat pula jumlah nikah, talak, cerai dan rujuk selama tahun 2003 yang tercatat sebanyak 835 yang berarti mengalami jumlah penurunan sebesar 26,11%. Kontribusi terbesar terhadap penurunan jumlah tersebut adalah jumlah pernikahan dimana pada tahun 2002 tercatat sebanyak 1.120 sedangkan tahun 2003 sebanyak 824 (turun 26,43%).

Upaya Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dalam rangka peningkatan pelayanan Ibadah Haji terus dilaksanakan, seperti misalnya pelayanan terhadap kesehatan serta pelatihan Manasik Haji yang melibatkan Departemen Agama, bagian Sosial Setwilda Tingkat II Kapuas Hulu dan Dinas Kesehatan. Sementara berdasarkan data peserta ibadah haji tahun 2002-2003, terjadi kenaikan jumlah peserta sebesar 4,4% baik yang berangkat maupun peserta haji yang kembali. Jika tahun 2002 tercatat 91 peserta haji yang berangkat dan kembali, maka pada tahun 2003 bertambah menjadi 95 peserta.

## **C.6. KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya diarahkan pada usaha pembangunan fisik saja, melainkan juga mengupayakan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik. Usaha tersebut menyangkut masalah hak fakir miskin, penderita cacat, korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya, untuk mendapatkan pelayanan tersendiri/khusus dari pemerintah daerah.

Data statistik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, telah mencatat sejumlah penderita atau penyandang cacat dan jumlah korban bencana alam untuk tiap tahunnya, baik berdasarkan jenisnya maupun berdasarkan wilayah perkecamatan. Pada tahun 2003 terdapat 92 penyandang cacat tubuh, 120 orang penyandang tuna rungu/wicara, 168 orang penyandang tuna netra serta 56 orang penderita cacat mental. Sedangkan dari sejumlah bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2003 di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak tercatat adanya korban jiwa dari 40 peristiwa bencana alam yang terjadi, yakni bencana banjir 23 kali, tanah longsor 10 kali dan kebakaran sebanyak 7 kali. Jika melihat dari peristiwa bencana alam yang terjadi pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah peristiwa pada bencana banjir dan tanah longsor yang masing-masing pada tahun 2002 tercatat 14 dan 5 kali kejadian. Sementara bencana kebakaran mengalami

penurunan sebesar 66,67% dimana pada tahun tersebut terdata sebanyak 21 peristiwa kebakaran.

**Tabel : 47**  
**DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2003**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		2000	2001	2002	2003
1	PENYANDANG CACAT				
	a. Cacat Tubuh	186	221	221	92
	b. Tuna Rungu	263	299	299	120
	c. Tuna Netra	88	117	117	168
	d. Cacat Ganda	78	101	101	56
	<b>Jumlah</b>	<b>615</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>436</b>
2	BENCANA ALAM				
	a. Banjir	0	23	14	23
	b. Tanah Longsor	3	3	5	10
	c. Kebakaran	19	3	21	7
		<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>40</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2000-2003

Disamping itu, Dinas Sosial mencatat pula data realisasi kesejahteraan sosial Fakir Miskin pada tahun 2004 yakni sebesar 200 KK, Anak Asuh Hasil Rehabilitasi sebanyak 132 orang dan Wanita Tuna Susila sebanyak 40 orang. Sementara banyaknya penduduk lanjut usia yang tercatat pada tahun 2004 adalah 2.193 orang, anak terlantar sebanyak 20.756 orang dan penyandang cacat sebanyak 1.318 orang. Sedangkan jumlah Panti Asuhan dan Anak Asuh yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu hingga tahun 2004 masing-masing adalah 1 (satu) panti asuhan dan 40 anak asuh.

Pada bidang Peranan Wanita, Anak dan Remaja, selama periode lima tahun terakhir beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah program Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pembinaan dan pengembangan serta pelatihan manajemen dan kepemimpinan, pengembangan kesejahteraan keluarga (PKK) yang secara keseluruhan dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan terhadap peranan perempuan dan keluarga.

### C.7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Pembangunan perumahan atau pemukiman dan lingkungan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan akan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat. Pembangunan perumahan ini sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah kepada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan roda kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada umumnya kondisi perumahan dan pemukiman rakyat di Kabupaten Kapuas Hulu kurang menguntungkan dari aspek kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan karena rendahnya tingkat pengetahuan serta kemampuan ekonomi masyarakat. Lokasi pemukiman penduduk cenderung mengikuti alur atau aliran sungai dengan pola pertaniannya yang berpindah-pindah, dimana membawa pengaruh terhadap pola penataan desa yang umumnya terpecah dan cenderung menyebar tidak merata.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang/swasta di Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana, yang ada baru hanya berupa pembangunan perumahan yang dilaksanakan melalui program atau proyek pemerintah, seperti program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman, Perbaikan Rumah Desa, program kegiatan P2LDT, KIP dan Pembangunan Pedesaan.

Kualitas rumah tinggal secara umum ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Hasil Susenas 2004 untuk

---

Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan bahwa luas lantai yang paling banyak ditempati oleh rumah tangga adalah yang memiliki luas lantai antara 20-49m<sup>2</sup> sebanyak 47,60% dan luas lantai 50-99m<sup>2</sup> sebanyak 47,72%. Sedangkan jenis atap yang paling banyak digunakan adalah atap sirap sebanyak 61,94% dan seng 36,10%. Sementara jenis lantainya umum masih berupa lantai tanah yakni sebanyak 95,75% dengan jenis dinding terbanyak menggunakan bahan dari kayu (70,27%).

Penerangan rumah yang umum dan terbesar digunakan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah dari sumber listrik PLN sebanyak 62,06% dan pelita/sentir obor sebanyak 26,74%. Sedangkan sumber air minum yang terbesar berasal dari air sungai (59,31%) disusul oleh air kemasan (20,53%), mata air terlindung (10,68%) dan air hujan (4,65%)

### **C.8. KONDISI SOSIAL LAINNYA**

Untuk mengurangi kesenjangan serta pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, dilakukan upaya penyebaran penduduk secara berkelanjutan melalui program transmigrasi. Diharapkan dengan program ini tercipta persebaran tenaga kerja yang lebih merata, yang pada gilirannya akan memperluas lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha, mengembangkan potensi daerah, mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah serta membantu pengentasan rakyat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. Untuk daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2003 hanya tercatat satu kali penempatan peserta transmigrasi yakni pada bulan Desember 2003 di lokasi UPT XII Suhaid, Kecamatan Boyan Tanjung. Jumlah penempatan peserta transmigrasi tersebut sebanyak 872 jiwa dari 225 KK, dimana sebagian besar peserta transmigrasi berasal dari daerah Jawa yakni Jawa Barat (288 jiwa), Jawa Tengah (166 jiwa) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80 jiwa), selain dari daerah APPDT Kalimantan Barat sendiri yang berjumlah 338 jiwa.

Selanjutnya dibidang sosial lainnya, yakni sub sektor kepemudaan dan olah raga, sesuai program pemerintah yang telah dicanangkan dalam pembangunan daerah selama periode lima tahun terakhir, kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, jiwa kewiraswastaan, kesetiakawanan sosial serta kepeloporan pemuda dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara. Pembinaan dan pengembangan olahraga diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental rohani masyarakat serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin juga sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi. Penyediaan wadah-wadah organisasi berikut berbagai fasilitas prasarana dan sarana seperti gedung olahraga, lapangan dan pelatih olahraga serta penyelenggaraan program-program pelatihan dan sistem pembinaan penting untuk lebih dikembangkan secara profesional. Salah satu wadah atau organisasi kepemudaan yang dimiliki dan tersebar hampir di seluruh desa/kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah organisasi Karang Taruna.

Dari data Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, tercatat pula jumlah Desa atau Kelurahan berikut organisasi kepemudaan berupa Karang Taruna pada tahun 2004, yakni sebanyak 148 organisasi yang tersebar di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah 148 desa/kelurahan. Jika dibandingkan dengan tahun 2003, angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 4 organisasi, dimana pada tahun tersebut terdapat beberapa desa/kelurahan diantaranya tidak memiliki organisasi kepemudaan karang taruna.

### **C.9. BUDAYA DAERAH**

Pembangunan Kebudayaan Daerah diarahkan untuk menambah wawasan budaya serta menanamkan nilai, arti dan makna kehidupan budaya bangsa agar tumbuh kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional, dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, pembinaan kebudayaan daerah yang meliputi kesenian, kesastraan, adat istiadat, bahasa, nilai tradisional dan kepurbakalaan, yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus tetap dilestarikan dan dikembangkan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan kebudayaan meliputi 8 (delapan) aspek, yakni aspek Sejarah, Nilai Tradisional, Kepurbakalaan, Permusiuman, Kesenian, Aspek Penghayatan

---

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kebahasaan serta aspek Kesasteraan. Dari kedelapan aspek tersebut, sebagian besar telah berjalan di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah Kapuas Hulu sendiri.

Aspek Kesenian merupakan aspek yang paling menonjol berkembang di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya seni musik yang dapat dilihat dari meningkatnya apresiasi seni di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Seni musik yang begitu cepat berkembang ini tentunya berupa seni musik non tradisional yang menyangkut seni musik diatonis. Hampir banyak ditemukan bermunculannya grup-grup band dengan aliran musik yang beraneka ragam, menunjukkan tingginya minat masyarakat menekuni bidang musik ini. Meskipun demikian, bukan berarti perkembangan dan pembinaan kesenian musik tradisional dikesampingkan, akan tetapi melalui pegelaran-pegelaran, festival maupun pertunjukan-pertunjukan rakyat, keberadaan kesenian tradisional tetap eksis dan mendapat porsi yang seimbang dalam pengembangannya. Berbagai kegiatan kesenian baik berupa lomba maupun pertunjukan sering ditemukan, seperti yang tercatat selama ini diantaranya yakni adanya festival musik dan vocal lagu pop, dangdut atau lagu-lagu daerah, kemudian berbagai pegelaran tari daerah tradisional Dayak, tari kreasi baru Dayak dan Melayu, Tari Jepin, Syair Melayu dan Antar Sirih Pinang Adat Melayu.

Aspek lain yang merupakan aset nasional adalah aspek Sejarah, Nilai Tradisional dan Kepurbakalaan, berupa kegiatan Napak Tilas Kapuas Mahakam yang pernah dilakukan hingga membawa daerah Kapuas Hulu dikenal masyarakat Internasional, yakni pada tahun 1994. Dalam kalender kegiatannya saat itu, banyak obyek sejarah, nilai-nilai tradisional dan keurbakalaan yang dapat dan telah diangkat ke permukaan melalui kegiatan napak tilas tersebut.

Situs Neolitik Nanga Balang dan Situs Paleobangan Binawa yang telah diteliti oleh Balai Arkeologi Bandung yang juga memiliki nilai budaya dari aspek sejarah, nilai tradisional dan keurbakalaan, merupakan aspek budaya daerah yang telah menjadi kebanggaan nasional. Situs ini terletak di dusun Nanga Balang Kecamatan Putussibau yang merupakan prioritas utama dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Bandung yang meliputi 4 propinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat.

Selain itu terdapat pula aset budaya yang berupa bangunan, peralatan dan benda peninggalan sejarah, salah satunya adalah Rumah Adat Betang Panjang (*the Long Est House*) yang terdapat di desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Embaloh Hilir dengan struktur panjang 268 m, lebar 18 m dan tinggi 10 m. Dengan predikat sebagai rumah paling langka karena memiliki struktur rumah paling panjang dan tiang cukup tinggi, menjadikan aset ini sangat disukai oleh wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara bahkan betah untuk tinggal berlama-lama di Rumah Panjang yang belum tentu dapat ditemukan di negaranya. Aset ini tentunya memiliki arti cukup penting sebagai kebanggaan daerah bagi generasi dan keturunan nantinya selain tentu saja dapat dikembangkan lebih baik sebagai salah satu obyek wisata unggulan karena bentuk dan ciri khasnya yang sangat spesifik. Saat ini Rumah Adat Betang Panjang sudah termasuk situs peninggalan sejarah yang mendapat bantuan dana pemeliharaan dari proyek pemeliharaan peninggalan sejarah Kalimantan Barat.

Aspek Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah hidup dan berkembang secara tradisional di kalangan masyarakat asli Suku Dayak, melalui kegiatan upacara ritual adat yang dilakukan secara rutin dari generasi ke generasi dengan tertib dan khushuk atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan di bawah kepemimpinan pemuka adat dan pemerintahan desa setempat. Sementara dari aspek bahasa di daerah ini mengalami hambatan dalam hal pembinaan karena majemuknya bahasa yang ada di daerah Kapuas Hulu dan belum adanya tenaga khusus yang memiliki kemampuan dalam hal penilaian bahasa.